

**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN SUMBA BARAT
2018**

<http://sumba.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SUMBA BARAT**



**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN SUMBA BARAT
2018**

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN SUMBA BARAT 2018**

ISBN : 978-602-6597-80-9
Nomor Publikasi : 53012.001
Katalog BPS : 4102004.5301
Ukuran Buku : 21,59 cm x 27,94 cm
Jumlah Halaman : 37 Halaman

Naskah :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat

Dicetak Oleh :
CV. Inhud
Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Sumba Barat

Cetakan I : November 2019

Cetakan II : Desember 2019

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Publikasi “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumba Barat 2018” disusun guna memenuhi kebutuhan pengguna data statistik, khususnya statistik sosial. Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat kembali menerbitkan Publikasi ini.

Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan rangkuman berbagai data dasar yang bersumber dari sensus dan survei yang dilakukan oleh BPS serta data sekunder yang diperoleh dari instansi lain di luar BPS.

Maksud penerbitan publikasi ini adalah untuk melihat sejauh mana perkembangan kesejahteraan rakyat Sumba Barat dari tahun ke tahun. Dengan demikian diharapkan publikasi ini dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan pengambilan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat maupun sebagai acuan penelitian selanjutnya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih bagi terbitnya publikasi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak kami mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Waikabubak, November 2019

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Sumba Barat,



Ir. Joke Ratna Christina
NIP. 19681015 199401 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
Pendahuluan	viii
1. Kependudukan	1
- Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	1
- Kepadatan Penduduk	2
- Komposisi Umur dan Jenis Kelamin	3
- Perkawinan dan Keluarga Berencana.....	6
2. Kesehatan dan Gizi	10
- Status Kesehatan	10
- Status Gizi Balita	11
- Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	14
3. Pendidikan	17
- Tingkat Pendidikan	17
- Tingkat Partisipasi Sekolah	19
- Fasilitas Pendidikan	20
4. Ketenagakerjaan	22
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Kesempatan Kerja..	22
- Lapangan Pekerjaan dan Status Pekerjaan	24
5. Pola Konsumsi	28
- Perubahan Tingkat Kesejahteraan	28
- Pola Konsumsi Rumah Tangga	29
6. Perumahan dan Lingkungan	31
- Kualitas Rumah Tinggal	31
Daftar Pustaka	35
Istilah Teknis	36

DAFTAR TABEL

	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2014-2018 ...	1
Tabel 1.2	Kepadatan Penduduk Sumba Barat dan NTT Tahun 2016 - 2018.....	2
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Sumba Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018 (Berdasarkan Proyeksi Penduduk 2018).....	3
Tabel 1.4	Persentase Penduduk Sumba Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018	4
Tabel 1.5	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2017-2018	6
Tabel 1.6	Persentase Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2016-2018	7
Tabel 1.7	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Menurut Sedang Tidaknya Menggunakan/Memakai Alat/ Cara KB Tahun 2016-2018	8
Tabel 1.8	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Alat/Cara Kontrasepsi yang Dipakai Tahun 2016-2018.....	9
Tabel 2.1	Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2018 ...	10
Tabel 2.2	Perkebangan Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Bergizi Buruk Tahun 2016-2018.....	12
Tabel 2.3	Banyaknya Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Sumba Barat 2017-2018.....	13
Tabel 2.4	Indikator Ketersediaan Berbagai Sarana Kesehatan Tahun 2016-2018	14
Tabel 2.5	Persentase Wanita umur 15–49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Penolong Kelahiran Terakhir Tahun 2016-2018	15
Tabel 2.6	Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan Menurut Daerah, Penolong Kelahiran Terakhir dan Tempat Melahirkan Anak Hidup yang Terakhir, 2018.....	16

DAFTAR TABEL

	Judul Tabel	Halaman
Tabel 3.1	Persentase Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2018	17
Tabel 3.2	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2016-2018.....	18
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Usia Sekolah Tahun 2016-2018	19
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2018.....	20
Tabel 3.5	Rasio Murid Guru dan Rasio Guru Sekolah Tahun 2016-2018	21
Tabel 4.1	TPAK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2018.....	23
Tabel 4.2	Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2018..	23
Tabel 4.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2015-2018.....	24
Tabel 4.4	Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2018.....	25
Tabel 4.5	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2018.....	26
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Sumba Barat 2018.....	27
Tabel 5.1	Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan Tahun 2016-2018	29
Tabel 5.2	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2018 (Rupiah).....	30
Tabel 6.1	Persentase Beberapa Indikator Kualitas Perumahan Tahun 2016-2018	32
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tinggal Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan Tahun 2016-2018.....	33

DAFTAR GAMBAR

	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1.1	Kepadatan Penduduk Sumba Barat dan NTT Tahun 2016 - 2018.....	2
Gambar 1.2	Angka Beban Tanggungan Anak dan Lanjut Usia Tahun 2018..	5
Gambar 1.3	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur Tahun 2018....	6
Gambar 1.4	Rasio Jenis Kelamin Menurut Status Perkawinan Tahun 2018...	7
Gambar 1.5	Persentase Wanita 10 Tahun ke atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2016-2018 (%).....	8
Gambar 2.1	Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2018.....	11
Gambar 3.1	Persentase Angka Melek Huruf Tahun 2018.....	17
Gambar 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2018	22
Gambar 4.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018	24
Gambar 5.1	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2018.....	30
Gambar 6.1	Persentase Rumah Tinggal menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan Tahun 2016-2018..	32
Gambar 6.2	Persentase Rumah Tinggal Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan Tahun 2016-2018.....	33

PENDAHULUAN

1. Ruang Lingkup

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumba Barat 2018 ini merupakan lanjutan dari seri publikasi yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat.

Untuk mengetahui perkembangan kesejahteraan rakyat secara garis besar, diperlukan pengelompokan beberapa masalah sosial yang penting. Ada beberapa tabel yang tidak dimuat kembali dan ada pula data-data baru yang dimasukkan. Penyajian masalah sosial tersebut dibagi dalam enam kelompok, yaitu:

1. Kependudukan
2. Kesehatan dan Gizi
3. Pendidikan
4. Ketenagakerjaan
5. Pola Konsumsi
6. Perumahan dan Lingkungan

Indikator yang disajikan pada dasarnya berbentuk deskriptif yang telah dipilih, dengan harapan dapat menggambarkan suatu keadaan kesejahteraan yang terjadi dalam masyarakat.

Bentuk penyajian data, selain tabel dasar pada beberapa kelompok disajikan ukuran statistik yang lazim dipergunakan seperti persentase, rasio, proporsi, dan rata-rata yang semuanya ditujukan untuk menjelaskan perubahan yang terjadi.

2. Sumber Data

Sensus Penduduk

Sensus Penduduk diselenggarakan setiap 10 tahun untuk mengumpulkan data dasar penduduk dan rumah tangga di seluruh wilayah geografis Indonesia. Sejak era kemerdekaan Indonesia, telah diselenggarakan 6 kali sensus penduduk yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, dan 2000, dan 2010.

Sensus Penduduk menggunakan dua tahap pencacahan, yaitu pendataan bangunan (listing) dan pencacahan lengkap. Pencacahan lengkap meliputi semua orang yang berada di wilayah geografis Indonesia, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya), awak kapal berbendera Indonesia dalam perairan Indonesia maupun para tuna wisma (gelandangan) yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

Survei Sosial Ekonomi Nasional

Kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dimulai pada tahun 1963. Mulai Tahun 2011 Susenas dilaksanakan secara triwulanan dan pada sejak 2015 pelaksanaannya dirubah secara semester yaitu pada bulan Maret dan September.

Susenas mengumpulkan data kependudukan, kesehatan, pendidikan, fertilitas, pengeluaran rumah tangga, kriminalitas, serta perumahan dan lingkungan. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang umum dikumpulkan melalui pertanyaan KOR (pokok) setiap tahun. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang lebih spesifik dikumpulkan melalui pertanyaan modul setiap tiga tahun. Pertanyaan pertanyaan yang dikumpulkan secara berkala dalam pertanyaan modul adalah:

- (a) Konsumsi/Pengeluaran/Pendapatan
- (b) Kesehatan, Pendidikan, Perumahan dan Pemukiman, dan
- (c) Sosial Budaya, Kesejahteraan Rumah Tangga, Kriminalitas

Survei Angkatan Kerja Nasional

Kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

Tahun 2011-2014, kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan dilakukan secara triwulanan. Pelaksanaan Sakernas Triwulanan Tahun 2011 adalah sebagai berikut: Triwulan I (Februari), Triwulan II (Mei), Triwulan III (Agustus) dan Triwulan IV (November). Namun sejak tahun 2015 pelaksanaan Sakernas kembali dilaksanakan secara semesteran seperti sebelum tahun 2011, yaitu dilaksanakan pada bulan Februari untuk semester I dan bulan Agustus untuk semester II.

Sumber Data Lainnya

Selain dari sensus dan survei, Inkesra 2018 juga menggunakan data yang berasal dari catatan administrasi Departemen/Instansi Pemerintah di luar BPS sebagai sumber data sekunder.

1. Kependudukan

1. Kependudukan

Kependudukan

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan. Dalam proses dan kegiatan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena penduduk tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga menjadi sasaran pembangunan. Oleh sebab itu, untuk menunjang keberhasilan pembangunan, permasalahan penduduk tidak saja diarahkan pada upaya pengendalian penduduk, tetapi juga dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar disadari hanya akan merupakan beban (*liability*) pembangunan jika berkualitas rendah.

Berbagai hal tentang penduduk yang perlu diamati antara lain mengenai jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, komposisi dan distribusi penduduk, dan lain-lain sangat penting dan berkaitan erat dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Sumba Barat pada tahun 2018 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk mencapai 127.872 jiwa. Perkembangan dan pertumbuhan penduduk Sumba Barat selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Setahun (%)
(1)	(2)	(3)
2014	119.907	1,80
2015	121.921	1,68
2016	123.913	1,63
2017	125.776	1,50
2018	127.872	1,67

Secara absolut terlihat bahwa jumlah penduduk Sumba Barat terus bertambah namun secara relatif (yang dilihat dari laju pertumbuhan penduduk) terlihat bahwa laju jumlah penduduk Sumba Barat mengalami stagnasi di bawah 2 persen. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten telah berhasil menahan laju pertumbuhan penduduk, karena jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan yang tinggi dapat mengakibatkan beban pembangunan yang semakin berat untuk mencukupi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Tetapi jika mampu diseimbangkan/di-selaraskan/diserasikan dengan daya dukung dan daya tampung serta kondisi perkembangan sosial ekonomi serta sosial budaya dapat menjadi salah satu modal dasar dan faktor dominan bagi keberhasilan pembangunan.

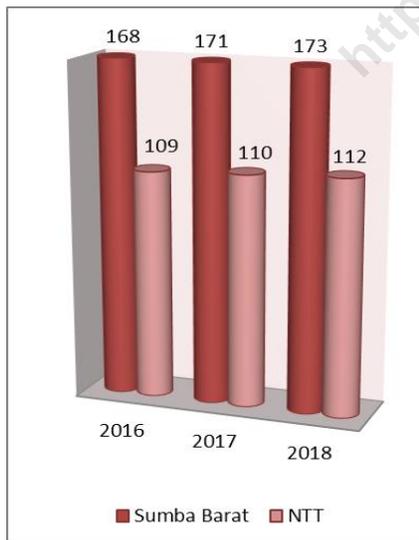
Kepadatan Penduduk

Kabupaten Sumba Barat yang mempunyai luas daratan sebesar 737,42 km² atau 1,54 persen dari total luas daratan wilayah Nusa Tenggara Timur, mempunyai rata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar 168 dan 171 jiwa per km². Sedangkan rata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2018 adalah sebesar 173 jiwa per km².

Tabel 1.2 Kepadatan Penduduk Sumba Barat dan NTT Tahun 2016-2018

Uraian	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)		
	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumba Barat	168	171	173
NTT	109	110	112

Gambar 1.1
Kepadatan Penduduk Sumba Barat dan NTT Tahun 2016-2018 (Jiwa/Km²)



Jika dibandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk Nusa Tenggara Timur, maka rata-rata kepadatan penduduk Sumba Barat berada di atasnya baik pada keadaan tahun 2016, 2017, maupun tahun 2018. Rata-rata kepadatan penduduk Nusa Tenggara Timur pada tahun 2016 adalah 109 jiwa per km², 110 jiwa per km² pada tahun 2017, dan 112 jiwa per km² pada tahun 2018.

Komposisi Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut umur sangat penting sebagai dasar penyediaan pelayanan untuk masyarakat. Komposisi penduduk menurut umur juga sangat penting dalam kependudukan. Kebutuhan penduduk terhadap suatu pelayanan tertentu bervariasi menurut umur. Kebutuhan akan suatu pelayanan bervariasi sepanjang siklus kehidupan. Sebagai contoh, bila jumlah penduduk umur sekolah dasar (umur 7-12 tahun) sangat besar, maka kebutuhan akan sekolah dasar akan cukup tinggi.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Sumba Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018 (Berdasarkan Proyeksi Penduduk 2018)

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	L + P
	Jumlah	Jumlah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	8.919	8.524	17.443
5-9	8.000	7.711	15.711
10-14	7.795	7.474	15.269
15-19	7.188	6.587	13.775
20-24	6.239	4.683	10.922
25-29	5.024	4.273	9.297
30-34	4.412	4.009	8.421
35-39	3.903	3.776	7.679
40-44	3.320	3.283	6.603
45-49	2.930	2.783	5.713
50-54	2.421	2.496	4.917
55-59	1.886	1.979	3.865
60-64	1.568	1.529	3.097
65-69	1.117	1.132	2.249
70-74	727	823	1.550
75+	634	727	1.361
Total	66.083	61.789	127.872

Kependudukan

Penduduk usia 0-14 tahun berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2018 sebesar 37,87 persen, usia 15-64 tahun sebesar 58,10 persen dan yang berusia 65 tahun ke atas sebesar 4,04 persen dari total penduduk. Dengan demikian dapat dikatakan penduduk Sumba Barat tergolong penduduk muda karena persentase penduduk anak-anak (usia di bawah 15 tahun) cukup besar, sementara persentase penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) rendah.

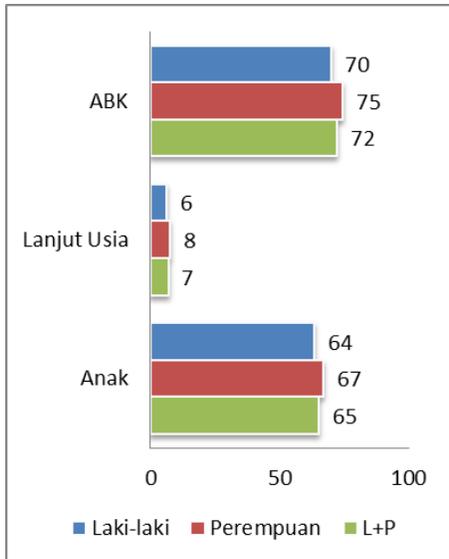
Tabel 1.4 Persentase Penduduk Sumba Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	L + P
	Jumlah	Jumlah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	13,50	13,80	13,64
5-9	12,11	12,48	12,29
10-14	11,80	12,10	11,94
15-19	10,88	10,66	10,77
20-24	9,44	7,58	8,54
25-29	7,60	6,92	7,27
30-34	6,68	6,49	6,59
35-39	5,91	6,11	6,01
40-44	5,02	5,31	5,16
45-49	4,43	4,50	4,47
50-54	3,66	4,04	3,85
55-59	2,85	3,20	3,02
60-64	2,37	2,47	2,42
65-69	1,69	1,83	1,76
70-74	1,10	1,33	1,21
75+	0,96	1,18	1,06
Total	100	100	100

Catatan : Berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2018

Tingkat keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan masih belum signifikan, terlihat pada komposisi penduduk menurut umur, yaitu dengan masih tingginya proporsi penduduk tidak produktif (berumur muda dan lanjut usia). Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kelahiran dan juga meningkatnya penduduk usia tua. Kedua faktor tersebut membuat Angka Beban Ketergantungan (ABK/*dependency ratio*) menjadi besar.

Gambar 1.2
Angka Beban Tanggungan Anak
dan Lanjut Usia
Tahun 2018



Pada tahun 2018 persentase penduduk anak-anak di Sumba Barat adalah 37,87 persen sedangkan persentase penduduk lanjut usia sebesar 4,04 persen. Dengan demikian, beban tanggungan anak (*child dependency*) cukup tinggi yaitu 65 dari ABK sebesar 72. Tingkat kelahiran yang tinggi cenderung diikuti oleh angka beban tanggungan anak yang tinggi pula. Sedangkan angka beban tanggungan lanjut usia (*old aged dependency*) pada tahun 2018 relatif kecil, yaitu 7.

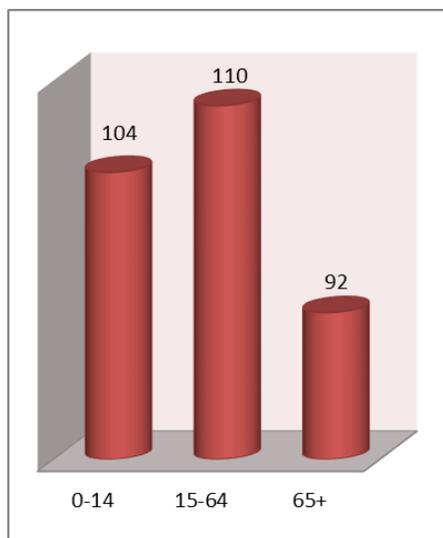
Ukuran yang paling umum untuk melihat struktur jenis kelamin adalah rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin adalah jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Ketidakseimbangan dalam struktur jenis kelamin merupakan salah satu masalah kependudukan yang dapat menyebabkan masalah sosial dan ekonomi dan dapat mempengaruhi penyediaan pelayanan. Dalam memenuhi kebutuhan berbagai ragam aspek pelayanan terdapat perbedaan jenis pelayanan untuk penduduk laki-laki dan perempuan.

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) pada waktu lahir biasanya di atas angka 100, yang artinya jumlah bayi laki-laki lebih banyak daripada bayi perempuan. Selanjutnya sejalan dengan perkembangan umur (sampai umur belasan), maka rasio jenis kelamin ini turun mendekati angka 100. Pada umur selanjutnya jumlah penduduk perempuan biasanya melebihi banyaknya penduduk laki-laki, atau rasio jenis kelaminnya di bawah angka 100. Dengan kata lain, laki-laki lebih banyak daripada perempuan pada kelompok umur muda, dan perempuan lebih banyak daripada laki-laki pada kelompok umur tua. Pola semacam ini biasanya dikaitkan dengan daya tahan hidup perempuan yang lebih baik daripada laki-laki.

Dari Gambar 1.3 dapat terlihat bahwa rasio jenis kelamin untuk kelompok umur 0-14 tahun pada tahun 2018 adalah sebesar 104 dan kelompok umur 15-64 adalah 110. Sedangkan pada kelompok umur 65 tahun ke atas Rasio Jenis Kelaminnya adalah 92 yang artinya adalah dari 100 orang perempuan pada kelompok umur 65 tahun ke atas terdapat 92 orang laki-laki.

Gambar 1.3
Rasio Jenis Kelamin
Menurut Kelompok Umur
Tahun 2018



Kependudukan

Perkawinan dan Keluarga Berencana

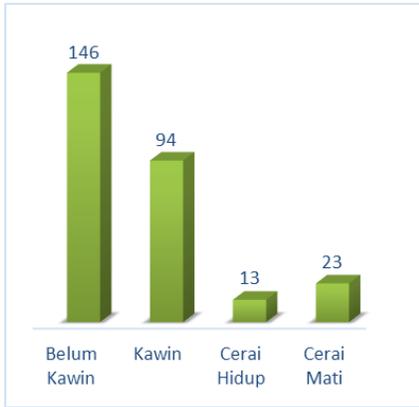
Perkawinan merupakan tuntutan biologis manusia yang berdampak menumbuhkan generasi baru. Akibatnya penambahan penduduk tidak dapat dihindari yang pada gilirannya memberi tekanan pada peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, pengaturan kelahiran melalui program keluarga berencana adalah sangat tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tabel 1.5 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2017-2018

Status	2017			2018			
	L	P	L + P	L	P	L + P	
Perkawinan	(1)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)
Belum Kawin	50,56	38,27	44,65	52,17	38,66	45,65	
Kawin	46,69	51,84	49,17	46,15	52,79	49,35	
Cerai Hidup	0,65	1,35	0,99	0,15	1,24	0,68	
Cerai Mati	2,10	8,53	5,20	1,53	7,31	4,32	

Dari tabel 1.5 tampak bahwa proporsi kelompok yang belum kawin pada tahun 2018 lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2017 maka secara umum terjadi kenaikan jumlah penduduk 10 tahun ke atas yang berada pada kelompok Kawin menjadi sebesar 49,35 persen pada tahun 2018. Jika dilihat dari Rasio Jenis Kelamin menurut Status Perkawinan pada tahun 2018 Status Belum Kawin rasionya adalah 146. Hal ini berarti pada tahun 2018, setiap seratus penduduk perempuan yang belum kawin terdapat 146 orang penduduk laki-laki yang juga belum kawin. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan laki-laki untuk

Gambar 1.4
Rasio Jenis Kelamin Menurut
Status Perkawinan
Tahun 2018



==== Kependudukan

menunda melakukan perkawinan. Sebaliknya, pada kelompok kawin tampak bahwa proporsi penduduk perempuan lebih tinggi daripada proporsi penduduk laki-laki pada periode yang sama. Dapat terlihat pada Gambar 1.4 Rasio Jenis Kelamin (RJK) untuk Status Perkawinan status Kawin, rasionya adalah 94 yang berarti terdapat 94 laki-laki status Kawin setiap 100 orang perempuan yang berstatus Kawin.

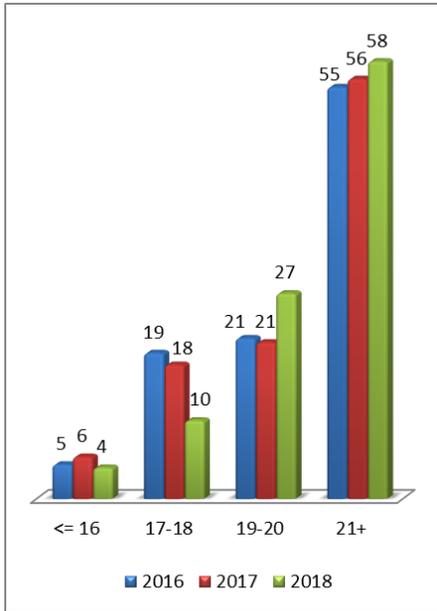
Pada kelompok cerai hidup dan cerai mati tahun 2018 proporsi perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hal ini ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin di bawah 100. Dengan demikian, terdapat indikasi bahwa penduduk perempuan lebih suka memilih untuk tetap hidup sendiri daripada penduduk laki-laki.

Tabel 1.6 Persentase Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kab. Sumba Barat Tahun 2016-2018

Umur Perkawinan Pertama	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
≤ 16	5	6	4
17-18	19	18	10
19-20	21	21	27
21+	55	56	58

Dipandang dari umur perkawinan pertama perempuan, persentase penduduk perempuan yang kawin di bawah umur 19 tahun pada tahun 2016 dan 2017 sekitar 24 persen namun mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi sekitar 14 persen. Sementara itu, persentase penduduk perempuan yang umur perkawinan pertamanya 19-20 tahun mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi sekitar 27 persen. Sedangkan sebagian besar perempuan yang pernah kawin memiliki usia perkawinan pertama pada usia 21 tahun ke atas pada tahun 2018. Dengan keadaan ini, diharapkan penduduk perempuan yang

Gambar 1.5
Persentase Wanita 10 Tahun ke
Atas yang Pernah Kawin
Menurut Umur Perkawinan
Pertama Tahun 2016-2018 (%)



Kependudukan

mempunyai status kawin dapat menjadi ibu yang berkualitas sehingga mampu melahirkan anak yang berkualitas pula sehingga sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan khususnya Kabupaten Sumba Barat menjadi semakin berkualitas.

Tabel 1.7 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Menurut Sedang Tidaknya Menggunakan/Memakai Alat/Cara KB Tahun 2016-2018

Sedang Menggunakan Alat KB?	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Ya	42	32	25
Tidak	58	68	75

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2018, terdapat sebanyak 25 persen penduduk perempuan usia 15-49 tahun dengan status kawin yang sedang memakai/menggunakan alat/cara KB. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 32 persen. Sedangkan penduduk perempuan usia 15-49 tahun dengan status yang sama tapi tidak memakai/menggunakan alat KB sebanyak 75 persen pada tahun 2018.

Tabel 1.8 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Alat/Cara Kontrasepsi yang Dipakai Tahun 2016-2018

Alat/Cara Kontrasepsi yang Dipakai	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
MOW/Tubektomi	32,17	30,21	3,87
MOP/Vasektomi	0,70	0,00	0,00
AKDR/IUD	0,51	6,24	1,96
Suntikan	24,82	24,19	42,30
Susuk KB	33,07	35,14	42,70
Pil KB	6,25	1,21	9,17
Kondom	0,00	3,02	0,00
Intravag	0,00	0,00	0,00
Alat/Cara Tradisional	2,49	0,00	0,00

Pada tahun 2018 sebanyak 47,57 persen dari penduduk perempuan Sumba Barat berada pada usia produktif (15-49 tahun). Sedangkan yang memiliki status kawin dan sedang memakai/menggunakan alat KB, sebagian besarnya memakai/menggunakan Susuk KB sebesar 42,70 persen. Dan diurutkan berikutnya adalah dengan menggunakan suntikan sebagai alat/cara KB dengan persentase sebesar 42,30 persen. Sedangkan pil KB berada di urutan ketiga dengan persentase pemakai/pengguna sebesar 9,17 persen. Semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk mengatur kelahiran diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi ibu dan anak-anak yang dilahirkannya, sehingga dapat melahirkan generasi yang berkualitas.

2. Kesehatan & Gizi

Kesehatan dan Gizi

Pembangunan kesehatan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional/regional, karena masalah kesehatan menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia.

Kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dapat dipandang dari aspek fisik dan non fisik yang keduanya saling berkaitan. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Indikator utama yang biasa dipakai untuk melihat derajat kesehatan adalah angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Selain derajat kesehatan, aspek penting lain dari kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang antara lain dapat diukur dari beberapa indikator seperti angka kesakitan dan status gizi. Beberapa indikator pemanfaatan fasilitas kesehatan seperti cakupan imunisasi, penolong persalinan dapat memberikan gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan derajat dan status kesehatan masyarakat.

Status Kesehatan

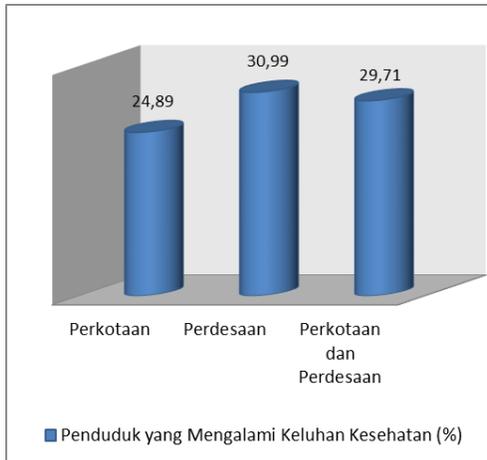
Status kesehatan memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk pada waktu tertentu. Status kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk. Pekerja yang tidak mengalami gangguan kesehatan akan dapat bekerja dengan jumlah jam kerja yang lebih lama dan bekerja lebih optimal. Status kesehatan penduduk secara keseluruhan dapat dilihat dengan menggunakan salah satunya indikator angka kesakitan. Dalam hal ini angka kesakitan menggambarkan persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan.

Tabel 2.1 Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2018

Angka Kesakitan*)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	38,09	32,46	27,73
Perempuan	41,50	33,05	31,81
L + P	39,75	32,75	29,71

*) Persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan

Gambar 2.1
Angka Kesakitan
Menurut Daerah Tempat
Tinggal Tahun 2018



Pada tahun 2016 penduduk yang mempunyai keluhan kesakitan mencapai 39,75 persen. Ini berarti lebih dari seperempat penduduk Sumba Barat pernah mengalami keluhan kesehatan. Kemudian pada tahun 2017 angka tersebut menurun menjadi 32,75 persen, dan kembali menurun pada tahun 2018 menjadi 29,71 persen. Hal ini menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat di Sumba Barat semakin baik. Status kesehatan penduduk laki-laki dan perempuan pada dasarnya tidak menunjukkan perbedaan yang berarti, meskipun tampak bahwa proporsi penduduk perempuan yang mengalami gangguan kesehatan sedikit lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Selain itu, gambar 2.1 menunjukkan bahwa angka kesakitan di perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Hal ini menjadi gambaran bagi pemerintah untuk lebih optimal dalam membangun sarana dan prasarana serta edukasi kesehatan yang menjangkau tingkat perdesaan.

Status Gizi Balita

Pemantauan kualitas fisik manusia dimulai sejak kelahiran. Berat badan menjadi salah satu indikator penting bagi kesehatan bayi yang dilahirkan. Dinas kesehatan kabupaten Sumba Barat mencatat bahwa selama tiga tahun terakhir jumlah bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) terus mengalami penurunan. Hal ini tidak terlepas dari semakin meratanya penyediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Sumba Barat. Bayi dengan BBLR rentan sakit dan mengalami infeksi, sedangkan dalam jangka panjang bayi tersebut beresiko mengalami keterlambatan perkembangan motorik atau kemampuan dalam belajar.

Peningkatan kualitas fisik sumber daya manusia akan lebih optimal jika dilakukan sejak dini, yang dalam hal ini pemantauan status gizi balita berperan penting dalam upaya peningkatan kualitas fisik penduduk

Sumba Barat. Tabel 2.2 menunjukkan bahwa selama tahun 2016-2018, dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat mencatat jumlah bayi yang bergizi buruk lebih dari 60 bayi per tahun. Pada level provinsi, NTT merupakan salah satu provinsi dengan prevalensi gizi buruk yang tergolong tinggi. Sebagai langkah preventif, penguatan fasilitas kesehatan yang menjangkau hingga tingkat desa perlu dioptimalkan. Langkah preventif lain dalam peningkatan kualitas kesehatan adalah dengan pemberian imunisasi pada Balita.

Tabel 2.2 Perkembangan Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Bergizi Buruk Tahun 2016-2018

Status Bayi	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
BBLR	94	92	67
Gizi Buruk	65	66	67

Dilihat dari imunisasi balita, perkembangannya selama periode 2016 sampai tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.3. Tabel ini memperlihatkan jenis imunisasi balita di Sumba Barat. Dapat dilihat bahwa untuk semua jenis imunisasi, balita yang mendapatkan imunisasi berfluktuasi dari tahun 2016 ke tahun 2018.

Selama periode tahun 2016 terdapat 2.333 balita di Kabupaten Sumba Barat yang mendapatkan imunisasi lengkap dan jumlahnya meningkat di tahun 2017 menjadi sebanyak 2.468 balita, kemudian menurun menjadi sebanyak 2.016 balita pada tahun 2018. Jenis imunisasi yang paling banyak didapatkan balita adalah imunisasi Polio 1 dimana pada tahun 2018 terdapat 2.541 balita yang mendapatkan imunisasi ini. Sementara Balita yang mendapatkan imunisasi BCG (imunisasi yang berfungsi untuk melindungi bayi dari infeksi tuberkolosis (TBC)) menurun menjadi 2.419 balita, sedangkan ada sebanyak 2.219 balita yang mendapatkan imunisasi campak. Untuk jenis imunisasi lainnya dapat dilihat secara rinci pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Banyaknya Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Sumba Barat 2016-2018

Jenis Imunisasi	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
BCG	2 742	3 291	2419
Campak	2 291	3 041	2219
DPT 1	2 826	3206	2440
DPT 2	2 706	3353	2249
DPT 3	2 417	3310	2034
Polio 1	2 635	3455	2541
Polio 2	2 430	3237	2499
Polio 3	2 281	3350	2287
Polio 4	2 022	3223	2034
Hepatitis B 0	1 804	1836	1802
Hepatitis B 1	2 826	3206	
Hepatitis B 2	2 706	3353	
Hepatitis B 3	2 417	3310	
Imunisasi Lengkap	2 333	2468	2016

Sumber : Sumba Barat dalam Angka 2018

Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk dilakukan antara lain dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan. Tabel 2.4 menunjukkan ketersediaan sarana kesehatan di Kabupaten Sumba Barat pada periode tahun 2015-2017. Indikator ketersediaan berbagai sarana kesehatan tersebut mencakup jumlah Dokter, jumlah Puskesmas, jumlah Rumah Sakit, serta kapasitas tempat tidur di rumah sakit. Pada tahun 2018 terdapat 43 dokter di Sumba Barat dengan perbandingan dokter dan total penduduk yang dilayani sebesar 1:3.456 jiwa. Sedangkan Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan terdepan yang terdapat di setiap kecamatan, di tahun 2018 berjumlah 10 Puskesmas (belum termasuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling). Pada tahun 2018 jumlah dokter di puskesmas sebanyak 10 orang.

Tabel 2.4 Indikator Ketersediaan Berbagai Sarana Kesehatan Tahun 2016-2018

Tenaga/Sarana Kesehatan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Dokter	37	37	43
Perbandingan Dokter dan Penduduk Sumba Barat	1 : 3.349	1 : 3.399	1 : 3.456
Jumlah Puskesmas *)	9	9	10
Jumlah Dokter di Puskesmas	11	11	10
Jumlah Rumah Sakit	2	2	2
Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit	-	-	-

*)Belum Termasuk Puskesmas Pembantu dan Keliling

Untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik, masyarakat harus datang ke rumah sakit. Pada tahun 2018 terdapat 2 rumah sakit di Kabupaten Sumba Barat. Pada Tahun 2015 tercatat kedua Rumah Sakit tersebut memiliki kapasitas 215 tempat tidur sementara untuk tahun 2016 hingga 2018 data tidak tersedia.

Bagian penting dalam upaya mengurangi insiden kematian bayi dan kematian maternal (ibu) adalah penyediaan pelayanan persalinan oleh tenaga medis. Program Bidan di Desa (BDD) merupakan upaya terobosan untuk maksud tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat, tercatat sampai dengan tahun 2018 jumlah bidan yang terdapat di Kabupaten Sumba Barat sebanyak 46 bidan. Jumlah ini masih sangat kurang mengingat jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2018 ada sebanyak 74 desa/kelurahan.

Tabel 2.5 Persentase Wanita umur 15–49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Penolong Kelahiran Terakhir Tahun 2016-2018

Penolong Kelahiran Terakhir	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Dokter	31,63	24,67	28,71
Bidan/Perawat	58,56	71,41	64,25
Dukun	9,81	3,92	7,04
Beranak/Paraji/Lainnya			

Sehubungan dengan data penolong kelahiran terakhir pada tabel 2.5, pemerintah perlu terus mendorong agar penolong kelahiran terakhir oleh tenaga medis (dokter dan bidan/perawat) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 terdapat sebanyak 90,19 persen pertolongan kelahiran terakhir dilakukan oleh tenaga medis. Pada tahun 2017 angka ini meningkat menjadi 96,08 persen tetapi pada tahun 2018 sedikit menurun menjadi 92,96 persen. Jika dilihat lebih rinci, maka lebih dari 50 persen

pertolongan persalinan terakhir selama tiga tahun terakhir dilakukan oleh bidan/perawat. Sementara itu, pertolongan kelahiran terakhir yang dilakukan oleh dokter sekitar seperempat dari total kelahiran.

Selama tiga tahun terakhir eksistensi tenaga non medis masih nampak dalam realita masyarakat Sumba Barat. Hal ini dibuktikan oleh kehadiran dukun beranak/paraji/lainnya sebagai penolong kelahiran terakhir. Dukun beranak/paraji/lainnya tercatat menjadi penolong kelahiran terakhir bagi 7,04 persen wanita yang melahirkan sepanjang tahun 2018. Peranan tenaga non medis ini relatif lebih rendah dibandingkan tahun 2016. Hal ini menandakan semakin baiknya tingkat pengetahuan kesehatan ibu hamil yang diharapkan dapat menekan angka kematian bayi.

Menurut daerah tempat melahirkan, perempuan yang melahirkan di perkotaan hampir seluruhnya ditolong oleh tenaga medis di tempat fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas. Sementara itu sekitar 1 dari 10 perempuan yang melahirkan di perdesaan ditolong oleh bukan tenaga medis, seperti dukun/paraji/lainnya dan tempat melahirkannya di rumah/lainnya. Tabel 2.6 secara jelas menggambarkan bahwa masih ada kecenderungan masyarakat perdesaan untuk menggunakan tenaga non medis dan menggunakan rumah/lainnya sebagai tempat melahirkan. Ini menjadi potret bagi pemerintah untuk optimalisasi fungsi tenaga medis dan fasilitas kesehatan di tengah masyarakat.

Tabel 2.6 Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan Menurut Daerah, Penolong Kelahiran Terakhir dan Tempat Melahirkan Anak Hidup yang Terakhir, 2018

Indikator	Perkotaan	Perdesaan
(1)	(2)	(3)
Penolong Kelahiran		
Tenaga Medis	100	91,5
Bukan Tenaga Medis	0	8,50
Tempat Melahirkan		
Fasilitas Kesehatan	100	88,82
Rumah/Lainnya	0	11,18

3. Pendidikan

3. Pendidikan

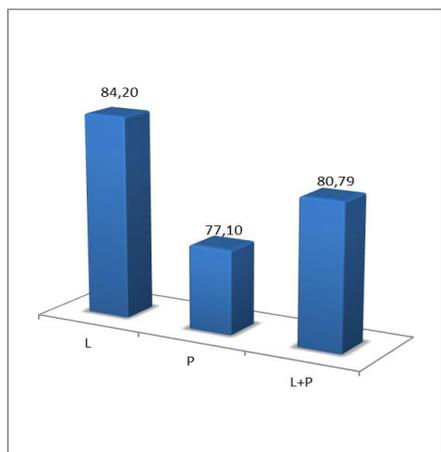
Pendidikan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia bertitik tolak pada upaya pembangunan di bidang pendidikan. Pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun telah meningkatkan partisipasi anak, khususnya anak sekolah untuk mendapatkan pendidikan dasar dan menengah. Pada saat ini, jangkauan wajib belajar semakin diperluas menuju wajib belajar 12 tahun. Dengan program ini diharapkan hampir semua penduduk yang berusia 7-18 tahun mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas atau sederajat.

Tingkat Pendidikan

Pada tingkat makro, tingkat pendidikan yang sangat mendasar dapat dilihat dari kemampuan baca tulis penduduk dewasa (umur 15 tahun ke atas). Pada tahun 2018 lebih dari 80 persen penduduk Sumba Barat telah melek huruf. Lebih dari itu, persentase laki-laki yang melek huruf lebih besar daripada perempuan. Hal tidak terlepas dari struktur penduduk kita yang jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan.

Gambar 3.1
Persentase Angka Melek Huruf
Tahun 2018



Tabel 3.1 Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah, 2016-2018

Indikator	2016	2017	2018
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6,45	6,51	6,52
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,64	12,87	12,88

Selain angka melek huruf, indikator pendidikan penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari rata-rata lama bersekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah. Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Sementara itu, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS

dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

RLS tahun 2016-2018 yang ditunjukkan pada tabel 3.1 menggambarkan bahwa jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk Sumba Barat usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal adalah sebesar 6 hingga 7 tahun atau setara tamat SD. Sementara itu, HLS tahun 2016-2018 sebesar 12 hingga 13 tahun berarti secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2016-2018 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12 hingga 13 tahun atau setara dengan Diploma I.

Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas penduduk karena kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk berumur 15 tahun ke atas. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan memberikan gambaran tentang keadaan kualitas sumber daya manusia. Secara umum, peningkatan pendidikan penduduk terus menerus terjadi, yaitu dengan semakin banyaknya penduduk yang berpendidikan lebih tinggi.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2016-2018

Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/Sederajat ke bawah	65,07	56,01	56,44
SMP/Sederajat & SMA/Sederajat	29,82	35,94	38,65
Pendidikan Tinggi	5,11	8,05	4,91

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang berpendidikan SMP/Sederajat & SMA/Sederajat pada tahun 2016 sebesar 29,82 persen, kemudian mengalami kenaikan hingga tahun 2018 menjadi 38,65 persen. Sementara itu, tamatan pendidikan tinggi pada tahun 2018 sebesar 4,91 persen.

Sedangkan pada tahun yang sama jumlah penduduk yang tamatan SD/Sederajat ke bawah sebesar 56,44 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016. Meskipun mengalami penurunan, banyaknya proporsi penduduk yang tamatan SD/Sederajat ke bawah harus mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah karena diketahui juga bahwa untuk pembangunan yang berkelanjutan, kebutuhan akan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dan terampil dirasakan sangat mendesak.

Tingkat Partisipasi Sekolah

Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat untuk memajukan negara dan merupakan fondasi bagi kemajuan sebuah bangsa. Untuk melihat kondisi pendidikan di kabupaten Sumba Barat salah satunya melalui tingkat partisipasi sekolah yaitu dengan melihat Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka partisipasi kasar akan menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkatan pendidikan.

Partisipasi sekolah menurut kelompok umur disajikan pada Tabel 3.3. Pada tahun 2018, APK untuk jenjang pendidikan SD di Kabupaten Sumba Barat sebesar 116,97. APK yang lebih besar dari 100 berarti terdapat penduduk di luar usia 7-12 tahun bersekolah pada Sekolah Dasar. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen antara lain disebabkan oleh pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2018

Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/MI	117,69	114,94	116,97
SMP/MTs	99,32	98,12	97,30
SMA/SMK/MA	68,56	80,82	79,11

Sementara untuk APK SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menunjukkan angka dibawah 100. Artinya tingkat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan bersangkutan masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Dengan kata lain, masih terdapat penduduk usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah di tingkat SMP/MTs dan penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah di tingkat SMA/SMK/MA. Terdapat kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah angka partisipasi sekolahnya. Dengan adanya subsidi pendidikan dan juga bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu diharapkan angka partisipasi sekolah semakin tinggi.

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2018

Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	94,20	96,78	97,93
SLTP	69,47	67,66	69,87
SLTA	54,21	56,54	55,44

Angka partisipasi murni menurut jenjang pendidikan mengukur banyaknya penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu dalam suatu jenjang pendidikan dari setiap 100 penduduk usia sekolah. Tabel 3.4 menunjukkan penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah tepat waktu pada jenjang SD sebesar 97,93 persen pada tahun 2018. Penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah tepat waktu pada jenjang SMP sebesar 69,87 persen. Sementara itu, hanya setengah dari penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah tepat waktu pada jenjang SMA/ sederajat. Perbedaan tingkat APM antar tingkat pendidikan menunjukkan kecenderungan semakin tinggi tingkat

pendidikan, maka semakin rendah angka partisipasi sekolahnya.

Fasilitas Pendidikan

Meningkatnya partisipasi penduduk dalam pendidikan harus sejalan dengan peningkatan fasilitas pendidikan. Tabel 3.5 menunjukkan perkembangan fasilitas pendidikan pada tahun 2016-2018. Pada tahun 2018 ini Rasio Murid-Guru relatif stabil dibanding tahun sebelumnya untuk jenjang pendidikan SMA yaitu sebesar 16, yang artinya setiap satu guru mengawasi 16 orang murid. Pada jenjang SD Rasio Murid-Guru tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar 20, yang artinya ada sebanyak 20 murid yang diawasi oleh setiap guru. Sedangkan pada jenjang SLTP Rasio Murid-Guru mengalami penurunan menjadi 16 pada tahun 2018, artinya setiap guru mengawasi 16 murid. Semakin kecil angka rasio Murid-Guru diharapkan akan semakin baik pengawasan guru terhadap murid. Rasio Guru-Sekolah pada tahun 2018, untuk jenjang SD relatif stabil dibanding tahun sebelumnya, yaitu untuk jenjang SD 12 banding 1, sedangkan untuk jenjang pendidikan SLTP mengalami kenaikan menjadi 17 banding 1, dan untuk jenjang SLTA mengalami kenaikan menjadi 31 banding 1.

Tabel 3.5 Rasio Murid Guru dan Rasio Guru Sekolah Tahun 2016-2018

Jenjang Pendidikan	2016		2017		2018	
	Rasio Murid-Guru	Rasio Guru-Sekolah	Rasio Murid-Guru	Rasio Guru-Sekolah	Rasio Murid-Guru	Rasio Guru-Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
SD	20	13	20	12	20	12
SLTP	16	17	26	9	16	17
SLTA	17	24	14	28	16	31

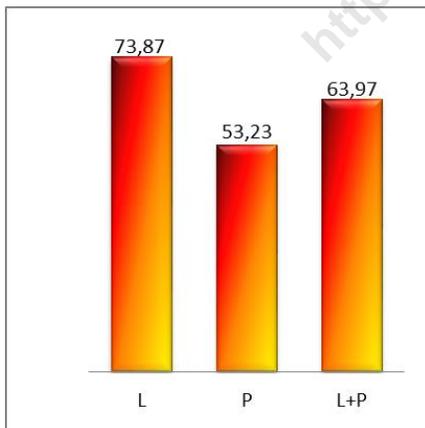
4. Ketenagakerjaan

4. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2018, jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan (kategori angkatan kerja) tercatat sebesar 63,97 persen, terdiri dari 95,94 persen penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja dan 4,06 persen penduduk 15 tahun ke atas yang mencari pekerjaan.

Gambar 4.1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2018



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Kesempatan Kerja

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan), disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Keterlibatan penduduk dalam angkatan kerja pada tahun 2018 menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi dibandingkan dengan perempuan. Walaupun tidak dapat dipungkiri di Sumba Barat perempuan dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan jumlahnya juga cukup banyak. Hal ini disebabkan semakin membaiknya kualitas sumber daya manusia yang kita miliki dan semakin besarnya keinginan perempuan untuk terlibat dalam kegiatan di luar rumah.

**Tabel 4.1 TPAK Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2015-2018**

Tahun	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	76,43	57,57	67,03
2017	74,00	42,26	58,77
2018	73,87	53,23	63,97

*)Data tahun 2016 tidak tersedia

Tabel 4.1 menunjukkan masih adanya kesenjangan partisipasi kaum laki-laki dan perempuan dalam iklim ketenagakerjaan Sumba Barat. Hal ini ditunjukkan oleh TPAK laki-laki yang jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dari total 51 ribu angkatan kerja di Sumba Barat, 30 ribumannya adalah laki-laki. Meskipun demikian TPAK perempuan tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan partisipasi perempuan yang semakin aktif dalam pasar tenaga kerja Sumba Barat.

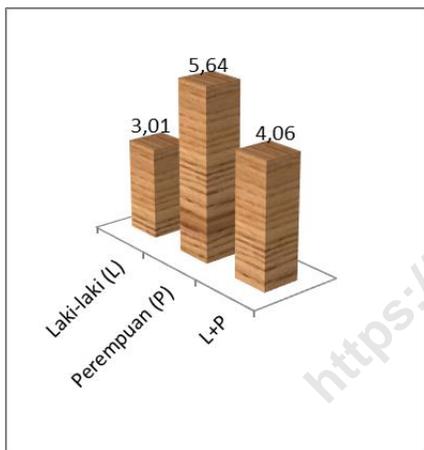
**Tabel 4.2 Kesempatan Kerja Menurut
Jenis Kelamin Tahun 2015-2018**

Tahun	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	98,33	98,03	98,20
2017	95,30	97,81	96,17
2018	96,99	94,36	95,94

*)Data tahun 2016 tidak tersedia

Banyaknya penduduk yang masuk dalam pasar kerja menunjukkan jumlah penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kesempatan kerja yang ada memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja, sehingga angkatan kerja yang tidak terserap merupakan masalah karena mereka terpaksa menganggur. Pada tahun 2015 tingkat kesempatan kerja sebesar 98,20 persen namun angka ini mengalami penurunan hingga tahun 2018 menjadi sebesar 95,94 persen.

Gambar 4.2
Tingkat Pengangguran
Terbuka Tahun 2018



Tabel 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka
Tahun 2015-2018

Tahun	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	1,67	1,97	1,80
2017	4,70	2,19	3,83
2018	3,01	5,64	4,06

*)Data tahun 2016 tidak tersedia

Tabel 4.3 menunjukkan angka pengangguran terbuka tahun 2015-2018. Angka-angka yang tertera pada tabel 4.3 ternyata masih relatif rendah bahkan untuk ukuran internasional. Hal ini terjadi karena di Sumba Barat dan Indonesia pada umumnya, menganggur merupakan keadaan yang tidak mungkin dilakukan oleh penduduk, sehingga kesempatan kerja yang tersedia langsung diterima sebagai pekerjaan padahal kesempatan kerja yang ada tersebut umumnya adalah sektor informal. Secara definisi mereka dianggap bekerja sekalipun pendapatan yang diperoleh relatif rendah.

Lapangan Pekerjaan dan Status Pekerjaan

Proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja.

Selain itu, indikator tersebut mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah.

Sektor primer (pertanian) merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Sumba Barat. Pada tahun 2018 sebanyak 23.454 pekerja diserap sektor primer. Tingginya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian tersebut menunjukkan bahwa masih belum optimalnya perkembangan pada sektor yang lebih modern, yaitu sektor sekunder/industri dan sektor jasa-jasa/tersier. Seperti yang terlihat pada tabel 4.4, jumlah penduduk yang bekerja di sektor sekunder (industri; listrik, gas, dan air; dan konstruksi) dan tersier (perdagangan; transportasi dan komunikasi; keuangan; dan jasa) pada tahun 2018 berturut-turut sebanyak 6.534 pekerja dan 18.941 pekerja. Sektor pertanian, administrasi pemerintahan dan perdagangan terbukti berperan penting dalam menyerap tenaga kerja yang banyak dan juga memberikan kontribusi terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumba Barat.

Tabel 4.4 Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2018

Lapangan Usaha Utama	Penduduk yang Bekerja	
	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23.454	47,93
Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik, Gas dan Air	1.133	2,32
Industri Pengolahan	3.811	7,79
Konstruksi	1.590	3,25
Perdagangan	5.595	11,43
Transportasi dan Pergudangan	2.669	5,45
Informasi & Komunikasi; Jasa Keuangan; dan Jasa Perusahaan	1.383	2,83
Administrasi Pemerintahan	4.644	9,49
Jasa Pendidikan dan Kesehatan	3.410	6,97
Jasa Lainnya	1.240	2,53

Indikator lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan pekerja adalah status pekerjaan. Terdapat 7 status pekerjaan utama yaitu: berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian serta pekerja tidak dibayar. Gambaran mengenai persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama pada tahun 2018 di Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2018

Status Pekerjaan Utama	Penduduk yang Bekerja	
	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)
Berusaha sendiri	6.507	13,30
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	15.972	32,64
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	683	1,40
Buruh/karyawan/pegawai	14.019	28,65
Pekerja bebas di pertanian	299	0,61
Pekerja bebas di non pertanian	318	0,65
Pekerja keluarga/ tak dibayar	11.131	22,75

Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa jumlah pekerja yang berstatus berusaha sendiri sebanyak 13,30 persen sedangkan berusaha dibantu anggota rumah tangga atau buruh tidak tetap mencapai 32,64 persen. Selain itu, jumlah pekerja berstatus buruh/karyawan tahun 2018 sebanyak 28,65 persen sedangkan pekerja yang berusaha dengan dibantu buruh tetap hanya sebesar 1,40 persen. Kedua kategori ini, buruh/karyawan dan berusaha sendiri dengan dibantu buruh tetap, termasuk dalam kategori pekerja di sektor formal yang jumlahnya hanya mencapai 30,05 persen pada tahun 2018. Dengan demikian pada tahun 2018,

jumlah pekerja di sektor informal sudah mencapai 69,95 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Sumba Barat bekerja di sektor informal, dimana pekerja tersebut adalah pekerja yang berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap tanpa harus menerima upah yang tetap atau bahkan anggota rumahtangga yang tidak menerima upah sepeser pun.

Usia 15 tahun merupakan usia yang telah cukup untuk mulai bekerja. Pemerintah menetapkan usia ini sebagai usia minimal bagi para pekerja. Jika dilihat berdasarkan struktur usia penduduk yang bekerja, pada tahun 2018 pekerja milenial mendominasi pasar kerja Sumba Barat. Hal ini tidak menjadi bonus tersendiri dalam pasar kerja jika lapangan usaha yang digeluti masih pertanian konvensional. Oleh karena itu peran pemerintah dalam mengoptimalkan pekerja usia 25 hingga 45 tahun menentukan tingkat produktivitas tenaga kerja secara menyeluruh di masa depan.

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin di Kabupaten Sumba Barat 2018

Kelompok Umur	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
15-19	1534	973
20-24	3150	1641
25-29	4558	2715
30-34	4025	2679
35-39	3795	2490
40-44	3198	2176
45-49	2707	1838
50-54	2225	1752
55-59	1633	1089
60+	2906	1845

5. Pola Konsumsi

5. Pola Konsumsi

Tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Makin besar pendapatan atau penghasilan suatu rumah tangga, berarti makin tinggi tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya makin kecil pendapatan suatu rumah tangga berarti makin rendah tingkat kesejahteraannya. Penghitungan pendapatan masyarakat secara langsung melalui survei seringkali sulit dilakukan, sehingga untuk mengatasi kesulitan itu, maka penghitungannya dilakukan dengan menggunakan data pengeluaran sebagai pendekatan pendapatan.

Pengeluaran rumah tangga yang dimaksud dibedakan menurut jenisnya, yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Dengan kedua jenis pengeluaran ini selain dapat diketahui jumlah pendapatan, juga dapat dilihat pola konsumsi masyarakat, yang mana semakin rendah persentase pengeluaran masyarakat untuk makanan terhadap total pengeluaran, pola konsumsinya akan semakin baik, sebaliknya makin tinggi persentase pengeluaran masyarakat untuk makanan terhadap total pengeluaran, pola konsumsinya makin buruk. Atau dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan, maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran untuk bukan makanan.

Perubahan Tingkat Kesejahteraan

Faktor utama dari tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk adalah daya beli, sehingga apabila daya beli menurun, maka berdampak pada menurunnya kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang menyebabkan tingkat kesejahteraan menurun. Tabel 5.1 menyajikan perkembangan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk di Kabupaten Sumba Barat pada periode tahun 2016-2018. Perkembangan pengeluaran per kapita tiga tahun terakhir belum memperlihatkan adanya peningkatan tingkat kesejahteraan yang signifikan dalam masyarakat jika dikaitkan dengan tingkat inflasi yang terjadi.

Tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat jika terjadi peningkatan riil dari pengeluaran per kapita, yaitu peningkatan nominal pengeluaran lebih tinggi dari tingkat inflasi pada periode yang sama. Pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2016 adalah Rp. 538.937. Sedangkan pada tahun 2017 terjadi peningkatan pengeluaran per kapita menjadi Rp. 577.851 atau terjadi peningkatan nominal setahun sebesar 7,22 persen. Kemudian pada tahun 2018 pengeluaran per kapita penduduk Sumba Barat kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 623.154 atau terjadi peningkatan nominal setahun sebesar 7,83 persen.

Tabel 5.1 Pengeluaran rata-rata per Kapita Sebulan Tahun 2016-2018

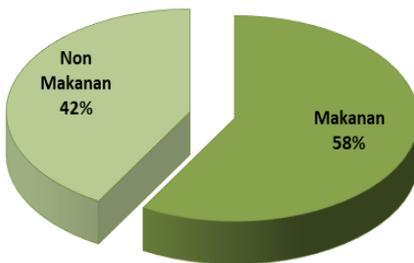
Tahun	Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)	Peningkatan Nominal Setahun (%)
(1)	(2)	(3)
2016	538.937	
2017	577.851	7,22
2018	623.154	7,83

Pola Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan, maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran untuk bukan makanan. Keadaan ekonomi Indonesia yang bergejolak hingga saat ini masih diyakini berdampak pula pada pola pengeluaran rumah tangga khususnya bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Pola konsumsi yang terjadi pada masyarakat cenderung lebih kepada konsumsi makanan. Penurunan standar hidup secara drastis akibat meningkatnya harga-harga kebutuhan rumah tangga

memaksa masyarakat khususnya yang berpendapatan rendah untuk melakukan tindakan dengan pola konsumsi yang lebih memberikan prioritas pada pengeluaran untuk makanan.

Gambar 5.1
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2018



Tabel 5.2 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2018 (Rupiah)

Tahun	Makanan	Non Makanan	Total Pengeluaran
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	363.183 (58,28)	259.971 (41,72)	623.154

Catatan: Angka dalam kurung menunjukkan persentase pengeluaran

Tabel 5.2 menyajikan pola konsumsi rumah tangga selama periode 2018. Pada periode ini, porsi pengeluaran untuk makanan adalah sebesar 58,28 persen. Sedangkan porsi pengeluaran untuk non makanan sebesar 41,72 persen. Pola konsumsi dimana porsi pengeluaran untuk makanan lebih besar dibandingkan pengeluaran non makanan merupakan salah satu fenomena yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat masih belum sepenuhnya tercapai selama periode tersebut.

Idealnya konsumsi non makanan akan meningkat seiring peningkatan pendapatan masyarakat. Penduduk yang penghasilannya kecil akan menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan pokok yaitu makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan, maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan akan menurun dan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan meningkat. Data proporsi konsumsi non makanan tiga tahun terakhir relatif menurun. Hal ini menunjukkan sebagian besar masyarakat masih menggunakan pendapatannya untuk kebutuhan makanan. Belum ada transformasi kesejahteraan yang signifikan dalam masyarakat Sumba Barat.

6. Perumahan & Lingkungan

Perumahan dan Lingkungan

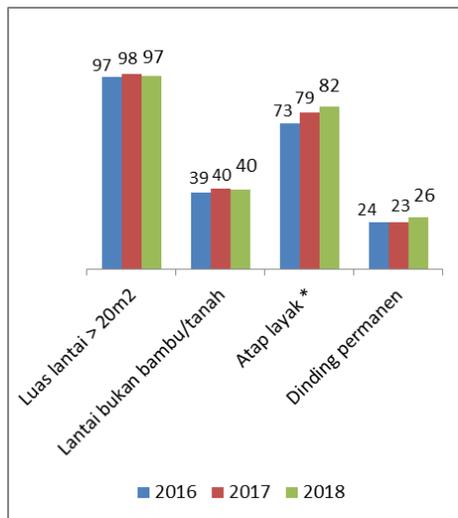
Manusia dan alam lingkungannya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan ini berupa lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik bisa berupa alam sekitar yang alamiah dan yang buatan manusia. Untuk mempertahankan diri dari keganasan alam, maka manusia berusaha membuat tempat perlindungan, yang pada akhirnya disebut rumah atau tempat tinggal. Sebagai makhluk sosial manusia selalu ingin bersama orang lain, maka muncul kelompok rumah-rumah yang disebut pemukiman.

Rumah dikategorikan sebagai bagian dari kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia selain sandang dan pangan. Pada saat ini rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi fungsinya sebagai tempat tinggal lebih menonjol. Karena itu aspek kesehatan dan kenyamanan dan bahkan estetika bagi sekelompok masyarakat tertentu merupakan hal penting yang menentukan dalam pemilihan rumah tinggal. Secara umum, kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan yang secara nyata dapat digunakan dalam menentukan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga menentukan tingkat kesejahteraan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Kualitas Rumah Tinggal

Rumah yang nyaman adalah rumah yang relatif luas sehingga penghuninya tidak berdesakan. Pada tahun 2018 tercatat sekitar 2,82 persen rumah tangga di Kabupaten Sumba Barat yang tinggal dalam rumah dengan ruang yang tersedia untuk setiap rumah tangganya kurang dari 20 m². Hal ini berarti sebagian besar rumah tangga (97,18 persen) tinggal dalam rumah dengan luas yang memadai. Luas lantai merupakan salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan rumah tangga dari sisi perumahan.

Gambar 6.1
Persentase Rumah Tinggal
Menurut Beberapa Indikator
Kualitas Perumahan
Tahun 2016-2018



Kualitas perumahan di Sumba Barat pada periode 2016-2018 ditunjukkan pada tabel 6.1, yang menunjukkan adanya perubahan-perubahan selama periode tersebut. Persentase rumah tangga dengan lantai bukan bambu/tanah relatif meningkat selama tiga tahun terakhir. Meskipun demikian, dapat dilihat bahwa 6 dari 10 rumah tangga di Sumba Barat masih memiliki lantai dari bambu/tanah. Masih tingginya jumlah rumah tinggal dengan lantai bambu di Sumba Barat disebabkan karakteristik budaya masyarakat Sumba Barat yang membuat rumah panggung.

Tabel 6.1 **Persentase Beberapa Indikator Kualitas Perumahan Tahun 2016-2018**

Indikator Kualitas Perumahan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Luas lantai > 20 m ²	96,58	97,98	97,18
Lantai bukan Bambu/Tanah	38,60	40,20	40,02
Atap layak *)	73,34	78,59	81,80
Dinding Permanen	23,54	23,29	26,16

*) Tidak terbuat dari dedaunan

Tidak jauh berbeda dengan indikator lantai tanah, indikator dinding tembok permanen menunjukkan angka yang bisa dikatakan masih cukup kecil yaitu 23,54 persen pada tahun 2016, kemudian mengalami peningkatan menjadi 26,16 persen pada tahun 2018. Dengan kata lain, Sekitar 7 dari 10 rumah tangga di Sumba Barat masih belum menggunakan dinding permanen. Sebagaimana pada indikator lantai tanah, hal ini dikarenakan masih banyak rumah adat di Sumba Barat masih menggunakan dinding bambu atau kayu.

Salah satu indikator perumahan yang kualitasnya terus membaik adalah penggunaan atap rumah yang layak. Pada tahun 2018 mayoritas rumah tangga di Kabupaten Sumba Barat (81,80 persen) sudah menggunakan atap layak, antara lain menggunakan seng sebagai atap rumah. Meskipun demikian masih terdapat sekitar 2 dari 10 rumah tangga masih menggunakan atap yang terbuat dari dedaunan. Secara umum

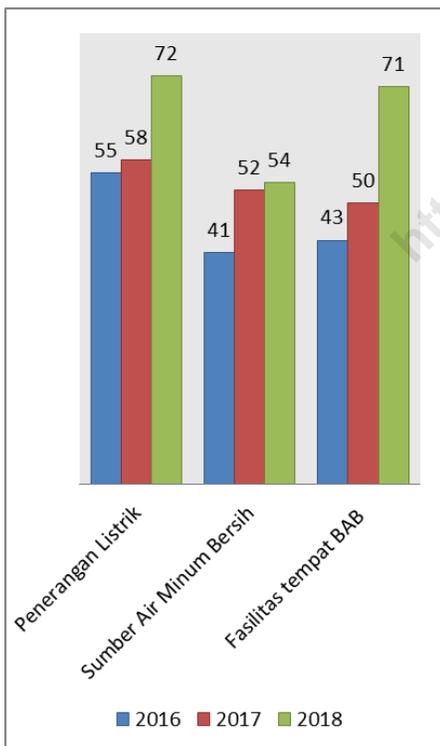
perkembangan kualitas luas lantai, jenis lantai, jenis atap, dan jenis dinding rumah relatif membaik dalam tiga tahun terakhir. Semakin banyak rumah tangga yang memiliki rumah layak huni, maka semakin baik kualitas kehidupan masyarakat Sumba Barat.

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal, yang juga menentukan kualitas suatu rumah tinggal. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya penerangan listrik, sumber air minum bersih, dan fasilitas tempat buang air besar (BAB).

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tinggal Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan Tahun 2016-2018

Indikator Fasilitas Perumahan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Penerangan Listrik	55,20	57,60	72,45
Sumber Air Minum Bersih	41,08	52,22	53,55
Fasilitas tempat BAB	43,33	49,89	70,50

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tinggal Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan Tahun 2016-2018



Seperti yang terlihat pada Tabel 6.2 pada tahun 2018 sudah sekitar 72,45 persen rumah tangga di Sumba Barat menggunakan listrik sebagai alat penerangan, dimana 55,39 persen menggunakan listrik PLN sedangkan 17,06 persen menggunakan listrik Non-PLN. Masih banyak desa-desa di Kabupaten Sumba Barat yang belum dapat dijangkau oleh PLN, sehingga masih menggunakan penerangan pelita/obor. Pada tahun 2018 terdapat sekitar 3 dari 10 rumah tangga di Sumba Barat menggunakan sumber penerangan bukan listrik, misalnya pelita. Terbatasnya distribusi listrik PLN di beberapa desa menyebabkan sumber penerangan bukan listrik menjadi pilihan alternatif. Secara umum distribusi listrik selama tiga tahun terakhir terus mengalami perluasan.

Sumber air minum bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam

Perumahan dan Lingkungan

kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Pada tahun 2018 di Sumba Barat banyaknya rumah tangga yang memiliki sumber air minum bersih sebanyak 53,55 persen. Angka ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, masih terdapat hampir setengah penduduk Sumba Barat belum memiliki Sumber air minum bersih.

Fasilitas perumahan berikutnya yang berkaitan dengan kesehatan adalah ketersediaan tempat BAB (jamban). Pada tahun 2016 tercatat sekitar 43,33 persen rumah tangga di Sumba Barat yang memiliki fasilitas tempat buang air besar, baik digunakan sendiri, atau bersama-sama rumah tangga lain, atau fasilitas BAB umum. Angka ini kemudian terus meningkat hingga pada tahun 2018, 7 dari 10 rumah tangga di Sumba Barat sudah memiliki fasilitas tempat BAB. Meskipun demikian, hanya 4 dari 10 rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB dan digunakan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- 2019, **Sumba Barat Dalam Angka**,
Waikabubak: Badan Pusat Statistik
- 2018, **Statistik Sosial dan Kependudukan Nusa Tenggara Timur**,
Kupang: Badan Pusat Statistik
- 2018, **Statistik Kesejahteraan Rakyat Sumba Barat**,
Waikabubak: Badan Pusat Statistik

<https://sumbabaratkab.bps.go.id>

ISTILAH TEKNIS

Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase.

Kepadatan Penduduk

Rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi.

Rasio Anak Wanita

Rata-rata banyaknya anak di bawah usia lima tahun per 1.000 wanita usia subur (15-44 th).

Rasio Jenis Kelamin

Banyaknya laki-laki dari setiap 100 wanita.

Metode Kontrasepsi

Cara/alat pencegah kehamilan.

Peserta Keluarga Berencana (Akseptor)

Orang yang mempraktekan salah satu metode kontrasepsi.

Klinik Keluarga Berencana

Tempat dimana pelayanan keluarga berencana dapat diperoleh. Tempat ini dapat berupa rumah sakit, puskesmas, balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA), Team Medis Keliling (TMK) atau tempat bebas lainnya yang ditentukan.

Status Gizi

Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Kategorisasi status gizi ini dibuat berdasarkan standar WHO/NCHS.

Pengeluaran

Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Penduduk Usia Kerja

Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

ISTILAH TEKNIS

Bekerja

Melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Mereka yang mempunyai pekerjaan tetap, tetapi sementara tidak bekerja dianggap sebagai pekerja.

Angkatan Kerja

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Penganggur

Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

Angka Beban Tanggungan

Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.

Angka Partisipasi Kasar

Rasio anak yang sekolah di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia normal untuk jenjang yang sama.

Angka Melek Huruf

Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis.

Luas Lantai

Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sumbaharutkab.bps.go.id>



BPS KABUPATEN SUMBA BARAT

Jl. Wee Karou, Waikabubak 87224

Telp. (0387) 21256 Fax. (0387) 21256

Email: bps5301@bps.go.id

ISBN 978-602-6597-80-9



9 786026 597809